

# ***Collaborative Governance dalam Penanggulangan Potensi Banjir di Kota Malang (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)***

## ***Collaborative Governance in Overcoming Potential Floods in Malang City (Study on the Malang City Regional Disaster Management Agency)***

Feri Achmad Ardiansyah<sup>1\*</sup>, Hayat<sup>2</sup>, Taufiq Rahman Ilyas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

<sup>1</sup> feriacmad10@gmail.com

\* corresponding author : Feri Achmad Ardiansyah

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : July 23, 2024

Revised : November 28, 2024

Accepted : January 8, 2025

#### Keywords :

*Collaborative Governance;  
Management Of Potential Flooding;  
Regional Disaster Management;*

#### Kata Kunci :

*Tata Kelola Kolaboratif;  
Penanggulangan Potensi Banjir;  
Penanggulangan Bencana Daerah;*



*This is an open access  
article under the CC-BY-SA license.*

Copyright (c) 2024 *Transparansi :  
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

### ABSTRACT

*This research discusses the role of Collaborative Governance in overcoming potential floods in Malang City. This research is motivated by the many flooding problems in several points in Malang City that have not been resolved. The aim of this research is to examine the role of Collaborative Governance in flood management in Malang City. The method used in this research is qualitative method. The informants in this research were the Regional Disaster Management Agency. The results of this research show that the duties and responsibilities of the Regional Disaster Management Agency in dealing with disasters are quite good. On the other hand, the research results found that the factors that cause flooding are not only natural factors but also a lack of public concern for the environment. Apart from that, existing obstacles to flood management are also due to limited funds, lack of public awareness, and the existence of sectoral egos.*

#### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran Collaborative Governance dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan banjir di beberapa titik Kota Malang yang belum teratasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan. Hasil penelitian ini menunjukkan tugas-tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi bencana terbilang cukup baik. Disisi lain, pada hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yang bukan hanya dari faktor alam namun juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, penghambat penanggulangan banjir yang ada juga dikarenakan faktor keterbatasan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya ego sektoral.

## PENDAHULUAN

Secara umum, iklim di Indonesia adalah tropis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, karena iklim negara ini umumnya hangat dan lembab. Perairan hangat di Indonesia merupakan faktor utama dalam menjaga kestabilan suhu di darat. Di Indonesia, variasi musiman tidak terlalu terlihat sehingga curah hujan menjadi penentu utama iklim di Indonesia. Banyak kota di Indonesia yang mengalami bencana banjir akibat hujan lebat (Findayani, 2015). Undang-Undang tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai landasan hukum penanggulangan bencana, Meskipun undang-undang ini mengatur mengenai penanggulangan bencana, masih terdapat sejumlah hambatan terkait implementasinya yang perlu dikaji (Sihaloho, 2022)

Bencana adalah suatu kejadian alam yang dapat membahayakan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya karena perbuatan manusia atau alam. Rentetan kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena sebab-sebab alam atau ulah manusia. Beberapa wilayah di Indonesia sering mengalami banjir, seperti halnya di Kota Malang, dimana curah hujan yang tinggi dan padatnya jumlah penduduk menjadi penyebab terjadinya banjir yang melanda Kota Malang (Pratiwi & Santosa, 2021).

Di bawah arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebuah lembaga pemerintah non departemen, melakukan penanganan bencana di kabupaten/kota. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan realisasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas melaksanakan tanggung jawab tersebut (Awusi et al., 2018). BPBD Kota Malang telah mengumpulkan informasi kejadian bencana yang menimpa sejumlah kabupaten dan kota, termasuk 4.650 kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 16,2% pada tahun berikutnya, dengan tercatat 5.402 kejadian pada tahun 2021 dan 3.544 insiden pada tahun 2022.

Kota Malang yang berpenduduk sekitar 846.130 jiwa menjadi lokasi riset terkait terjadinya banjir. Masyarakat Kota Malang, baik pekerja maupun pelajar, banyak yang datang dari luar kota untuk tinggal di kawasan perkotaan yang padat penduduknya. Arus urbanisasi semakin meluas akibat bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang yang berdampak pada bertambahnya jumlah ruang yang dibutuhkan untuk menampung struktur fisik yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk, dan seiring dengan pertumbuhan kota, lahan digunakan untuk tujuan lain atau dikonversi.

Saat hujan turun pada Maret dan April 2023 sekitar 11 lokasi di wilayah Kota Malang dilaporkan terendam banjir. Kemudian, pada bulan September hingga November, saat akan mulai musim hujan, lebih dari 13 titik mengalami kondisi serupa. Bahkan BPBD Kota Malang mendokumentasikan 18 kejadian banjir pada tahun 2022. Kejadian terparah terjadi di Jalan Danau Toba dan Jalan Ranu Grati, Kedungkandang yang ketinggian airnya mencapai 50 cm. Tercatat, tercatat 211 kejadian banjir yang dilaporkan ke BPBD Kota Malang pada tahun 2022. Kemudian, pada Maret 2023, 17 lokasi di Kota Malang termasuk di kawasan Belimbing (Ayu Niken Agustin, 2023).

Pemerintah Kota Malang harus memainkan peran penting dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi keadaan darurat. Pemerintah Kota Malang berupaya meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana dengan melakukan perencanaan ke depan dan meminimalkan korban jiwa dengan mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan ketika krisis terjadi. Selain itu, BPDB Kota Malang telah menyiapkan posko lapangan dengan sebanyak 50 orang personil yang tersebar di 5 kecamatan. Tentunya setiap posisi di tim ini dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan seperti helm, jaket pelampung, tenda dapur umum, dan perlengkapan lainnya untuk membantu mencegah korban jiwa jika terjadi banjir.

Untuk menanggulangi banjir di Kota Malang, pemerintah memerlukan bantuan pihak-pihak yang ahli dalam menanggulangi bencana banjir. Hal ini memerlukan dalam pengelolaan banjir dapat memberikan umpan balik atau reaksi dari berbagai sudut pandang, dimana sudut pandang ini dapat memberikan perspektif segar atau ide-ide inovatif terhadap pengelolaan banjir sehingga mempengaruhi pengelolaan banjir. Dalam proses penyusunan atau pelaksanaan kebijakan dan program publik, pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar pemerintah terlibat langsung dalam tata kelola kolaboratif. Untuk melaksanakan perencanaan pengendalian banjir dan menurunkan kemungkinan terjadinya banjir, semua pihak yang terlibat harus saling bekerja sama (Chris Ansell, 2008). *Coolaborative Governance* dalam hal ini mengacu pada solusi koperatif yang melibatkan organisasi sektor publik dan swasta serta masyarakat (Hayat, 2018). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melakukan riset untuk mengkaji lebih dalam terkait peran *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Malang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan merupakan proyek penelitian deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan berusaha menyelidiki suatu fenomena di lapangan dengan memberikan penjelasan terhadap beberapa permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu disebut pendekatan kualitatif (Sanjaya, 2015). Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, metodologi ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang telah terdokumentasi selain untuk mengumpulkan data yang berkualitas berupa pemberian gambaran secara jelas dan ringkas mengenai suatu skenario atau fenomena sosial di dalam kelas tanpa memberikan perhatian pada subjek yang dipelajari atau peristiwa yang sedang terjadi (Sugiyono, 2020)

Menurut Moleong (2016) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami responden penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain baik secara holistik maupun deskriptif melalui penggunaan bahasa dan bahasa. kata-kata dalam suasana alam yang unik dan dengan berbagai teknik alami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Malang

Upaya kerja sama yang dilakukan oleh berbagai aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai pihak, termasuk struktur pemerintah atau lembaga publik, lembaga swasta, dan kelompok masyarakat sipil. Setiap aktor memainkan peran tertentu dalam pengelolaan entitas dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam hal ini dibuat untuk membantu pemerintah memenuhi kewajibannya menurunkan bahaya banjir di bidang penanggulangan bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), suatu organisasi pemerintah yang bertugas menangani bencana di wilayah Kabupaten/Kota, merupakan pihak yang berwenang menangani banjir di Kota Malang. Didirikan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana, yang merupakan pelaksanaan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Badan Pengelola (Awusi et al., 2018).

Menurut Ansell dan Gash (2008) siklus proses kolaboratif terdiri dari diskusi tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman (*shared Understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcome*). Berdasarkan pemahaman tersebut maka collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Malang dapat dirinci sebagaimana berikut:

#### 1. Dialog tatap muka

Metode ini muncul sebagai hasil diskusi langsung dan tatap muka dengan masing-masing pemangku kepentingan yang berpartisipasi. Diskusi tatap muka ini penting untuk mengetahui keuntungan dan peluang yang dapat dinikmati kelompok, hal ini adalah kualitas yang berorientasi pada proses. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Kepala Divisi Darurat dan Logistik, Nugraha dengan menyatakan bahwa:

“... Cara kita menginformasikan himbauan terhadap warga dengan cara pihak BPBD datang ke setiap balai Desa untuk melakukan pertemuan terhadap perwakilan masyarakat untuk memberikan arahan kepada perwakilan masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir dan hal-hal yang harus dilakukan pada saat terjadi banjir.”

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi terkait himbauan bencana dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap perwakilan masyarakat yang arahkan oleh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang.

#### 2. Membangun Kepercayaan

Tindakan terbaik dalam proses kolaboratif termasuk pembuatan kebijakan adalah membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama. Membangun kepercayaan

antar pemangku kepentingan dalam proses pra-bencana melibatkan BPBD, pihak swasta, dan masyarakat yang bekerja sama di Kota Malang. BPBD menyediakan dana untuk pemasangan peralatan Peringatan Dini dan pembangunan gorong-gorong. Dengan banyaknya tempat yang rawan banjir, pemerintah telah mencoba sejumlah strategi untuk menanggulangnya. Adanya rencana induk drainase diyakini tidak akan mencegah banjir, sistem peringatan dini ini atau radar pendeteksi banjir akan diperlukan. Prayitno selaku Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, menyampaikan bahwa:

“...Untuk bisa mengetahui terjadinya banjir maka perlu adanya alat tambahan seperti EWS yang berfungsi sebagai alarm dan peringatan pada masyarakat tentang adanya potensi banjir yang akan terjadi. Saat ini Kota Malang memiliki 7 alat Early Warning System yang di sebar di beberapa wilayah Kota Malang”

Dari pemaparan yang disampaikan menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat yaitu dengan menyediakan alat peringatan dini guna mendeteksi akan terjadi bencana banjir.

### 3. Komitmen Terhadap Proses

Jika semua pihak yang terlibat berkomitmen dalam kolaborasi, maka kolaborasi tersebut bisa berhasil. Karena proses kolaboratif sebelum melaksanakan komitmen biasanya masih mempunyai tujuan tertentu, maka komitmen bergantung pada keyakinan bahwa pemangku kepentingan lainnya harus saling menghormati perbedaan pandangan dan kepentingan. Para pemangku kepentingan harus mampu meyakinkan diri mereka sendiri mengenai integritas prosedur musyawarah dan negosiasi. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Nugraha menyatakan bahwa:

“.....Pada saat pertemuan antara pihak BPBD dan masyarakat menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam penanganan banjir ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pemberi fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir”

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator senantiasa kebersamaan masyarakat dalam kasus penanganan bencana banjir

### 4. Pemahaman Bersama

Para pemangku kepentingan harus dapat mencapai kesepakatan tentang apa yang dapat dicapai selama fase ini. Agar dapat menemukan jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi, pengetahuan bersama ini dapat berbentuk suatu tujuan yang telah ditentukan dan dirumuskan dengan jelas mengenai permasalahan yang dihadapi bersama. Melalui proses ini, mereka dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga memerlukan normalisasi dan persetujuan masyarakat untuk pembongkaran sebagian lahan kebun mereka untuk dijadikan jalan bagi aliran air. Dalam kapasitasnya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Nugraha menyampaikan hal tersebut dengan mengatakan bahwa:

“... Pada saat proses sosialisasi ke setiap wilayah kelurahan pihak BPBD menghimbau terhadap warga agar menjaga lingkungan sekitar dan membersihkan saluran gorong-gorong serta meminta terhadap warga agar lahan perkebunan warga dijadikan sebagai saluran pembuangan air ke sungai agar meminimalkan saat terjadinya genangan air”

Pemaparan tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah bersama masyarakat perlu membentuk kesepakatan guna meminimalisir terjadinya banjir

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses dalam Penanggulangan Banjir di Kota Malang**

### 1. Faktor Pendukung

#### a) Partisipasi masyarakat setempat

Perhatian dan keterlibatan warga setempat dalam proses pencegahan banjir dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang yang dapat mempengaruhi kehidupan

warga setempat menjadi alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam hal ini tidak diragukan lagi penting untuk mencegah banjir. Meskipun tanggung jawab utama BPBD adalah penanggulangan bencana, namun masyarakat sangat antusias untuk membantu dan bekerja sama dalam penanggulangan banjir, sehingga wajar jika masyarakat merasa khawatir dengan keterlibatannya dalam proses penanggulangan dan pemulihan bencana banjir. Untuk mengurangi banjir, masyarakat turut ambil bagian dan berkolaborasi membersihkan sungai dan saluran air.

b) Ketersediaan Dana dan Alat yang dibutuhkan

Sejumlah dana yang diperlukan untuk program pengendalian banjir ini disebut dana. Dalam kapasitasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai fasilitator menyediakan dana dan peralatan yang diperlukan untuk pengendalian banjir. Dana dapat dialokasikan untuk beberapa tujuan, seperti pembelian kendaraan untuk keperluan pengiriman barang kepada warga yang terkena dampak bencana banjir atau pembuatan tanggul di sekitar sungai untuk mencegah meluapnya air sungai saat hujan deras. Mereka juga dapat digunakan untuk membangun saluran air untuk mengurangi kemungkinan banjir, serta instrumen seperti alarm banjir yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau pendeteksi akan datangnya banjir.

c) Proses transparan dalam kolaborasi

Tentu saja kemitraan melibatkan banyak pihak yang bekerja sama. Setiap pemangku kepentingan dalam kerjasama penanganan banjir harus bertindak transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pihak mana pun yang bertugas melaksanakannya. Seluruh biaya yang dikeluarkan dilaporkan dalam rapat setelah selesainya penanggulangan bencana banjir.

2. Faktor Penghambat

a) Keterbatasan dana

Dibutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan sebuah program dan menerapkan manajemen bencana banjir. Hambatan utama dalam mitigasi banjir tentu saja adalah distribusi pembangunan tanggul yang tidak merata dan tidak terpenuhinya pekerjaan drainase yang disebabkan oleh kendala keuangan. Tentu saja, penelitian dan pengembangan perlindungan banjir sangat penting untuk memprediksi banjir di masa depan.

b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hal ini biasanya sering terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, sebagian masyarakat masih memilih membuang sampahnya di selokan, sungai, dan saluran air lainnya sehingga menyebabkan penumpukan sampah dan terhambatnya aliran air yang dapat mengakibatkan banjir.

c) Adanya Ego Sektoral

Melalui upaya kolaborasi, masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk melakukan mitigasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Karena setiap pelaku kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir lebih fokus pada peran dan aktivitas masing-masing, maka setiap pemangku kepentingan mengembangkan ego sektoral. Karena kurangnya gotong royong, hal ini dapat menjadi penghambat keberhasilan implementasi rencana penanggulangan bencana banjir.

## KESIMPULAN

Secara umum, iklim di Indonesia adalah tropis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, karena iklim negara ini umumnya hangat dan lembab. Bencana adalah suatu kejadian alam yang dapat membahayakan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya karena perbuatan manusia atau alam. Rentetan kejadian yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena sebab-sebab alam atau ulah manusia. Kota Malang yang berpenduduk sekitar 846.130 jiwa menjadi lokasi riset terkait terjadinya banjir. Untuk menanggulangi banjir di kota Malang, pemerintah memerlukan bantuan pihak-



pihak yang ahli dalam menanggulangi bencana banjir. Berdasarkan pemaparan tersebut, hasil yang didapat ialah collaborative governance dalam penanggulangan banjir di kota malang dapat dirinci dengan dialog tatap muka, komitmen terhadap proses membangun kepercayaan, berbagi pemahaman ,dan hasil sementara. Faktor pendukung proses dalam penanggulangan banjir di kota malang ialah partisipasi masyarakat setempat, ketersediaan dana dan alat yang dibutuhkan, dan proses transparan dalam kolaborasi sedangkan yang menjadi penghambat dalam penanggulangan banjir di kota malang adalah keterbatasan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya ego sektoral.

## REFERENSI

- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21110>
- Ayu Niken Agustin. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permasalahan Banjir Di Kota Malang. *Dinamika*, 29(2).  
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19902>
- Chris Ansell, A. G. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4).  
<https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>
- Findayani, A. (2015). Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*, 12(1).  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/JG/article/download/8019/5561>
- Hayat. (2018). *kebijakan publik*. Intrans Publishing.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, Z. N., & Santosa, P. B. (2021). Pemodelan Banjir dan Visualisasi Genangan Banjir untuk Mitigasi Bencana di Kali Kasin Kelurahan Bareng Kota Malang. *Journal of Geospatial Information Science and Engineering (JGISE)*, 4(1).  
<https://journal.ugm.ac.id/jgise/article/view/56525>
- Sanjaya, W. (2015). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Cetakan Ke). Kencana.
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 6(1).
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. alfabeta.